



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/AKRED/S/XI/2014*

**Relevansi 16 Jilid Paket Kebijakan Ekonomi Presiden Joko  
Widodo dalam Mempermudah Akses FDI ke Indonesia**

Skripsi

Oleh

Olivia

2014330006

Bandung

2018



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/AKRED/S/XI/2014*

**Relevansi 16 Jilid Paket Kebijakan Ekonomi Presiden Joko  
Widodo dalam Mempermudah Akses FDI ke Indonesia**

Skripsi

Oleh

Olivia

2014330006

Pembimbing

Dr. Aknolt Kristian Pakpahan

Bandung

2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Olivia  
Nomor Pokok : 2014330006  
Judul : Relevansi 16 Jilid Paket Kebijakan Ekonomi Presiden Joko Widodo  
dalam Mempermudah Akses FDI ke Indonesia

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Jumat, 20 Juni 2018  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**

Dr. A. Irawan Justiniarto H. : \_\_\_\_\_

**Sekretaris merangkap pembimbing**

Dr. Aknolt Kristian Pakpahan : \_\_\_\_\_

**Anggota**

Giandi Kartasmita, S. IP., M. A. : \_\_\_\_\_

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Olivia

NPM : 2014330006

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Relevansi 16 Jilid Paket Kebijakan Ekonomi Presiden Joko Widodo dalam Mempermudah Akses FDI ke Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 3 Juli 2018

Olivia

## Abstrak

Nama : Olivia  
NPM : 2014330006  
Judul : Relevansi 16 Jilid Paket Kebijakan Ekonomi Presiden Joko Widodo dalam Mempermudah Akses FDI ke Indonesia

---

*Foreign Direct Investment (FDI)* merupakan salah satu sumber pendanaan yang berkontribusi besar pada perekonomian Indonesia. Melihat hal tersebut, pemerintah Indonesia semakin sadar akan pentingnya meningkatkan arus masuk FDI ke Indonesia. Maka dari itu, Presiden Indonesia, Joko Widodo mencanangkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I-XVI untuk mempermudah akses FDI ke Indonesia. Namun, untuk melihat pengaruh dari paket kebijakan ekonomi tersebut, penting untuk melihat keterkaitan atau relevansi dari paket kebijakan ekonomi jilid I-XVI dengan determinan-determinan FDI. Maka melalui tulisan penelitian ini, penulis merumuskan pertanyaan penelitian yaitu, **“Bagaimana relevansi 16 Jilid Paket Kebijakan Ekonomi Presiden Joko Widodo dalam mempermudah akses FDI ke Indonesia dalam periode 2014-2017?”**

Secara umum, determinan FDI dibagi menjadi *push factors* dan *pull factors*. Kebijakan-kebijakan pemerintah suatu negara dapat mempengaruhi determinan dalam *pull factors* suatu negara, yang berupa: kondisi perekonomian; kebijakan pemerintah terkait FDI; sumber daya alam dan sumber daya manusia; dan infrastruktur. Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan memiliki sumber daya alam yang kaya. Kondisi perekonomian Indonesia pun sedang mengalami tren kemajuan sebagai salah satu *emerging market economy*. Walaupun hal-hal tersebut menjadi daya tarik Indonesia dalam menarik investasi asing, namun terdapat beberapa faktor yang menghambat arus masuk FDI ke Indonesia. Hambatan-hambatan tersebut berupa tingkat korupsi di Indonesia, birokrasi di Indonesia yang tidak efisien, akses pembiayaan investasi Indonesia, dan risiko politik di Indonesia. Selain itu, tingkat *ease of doing business* Indonesia, yang merupakan indikator iklim investasi di Indonesia, masih kalah dari negara-negara tetangga lain. Tulisan ini akan menganalisis keterkaitan kebijakan dalam 16 Paket Kebijakan Ekonomi Joko Widodo terhadap masing-masing determinan dan hambatan tersebut.

Kata kunci: FDI, Paket Kebijakan Ekonomi, investasi asing, Indonesia, determinan FDI, hambatan FDI Indonesia

### **Abstract**

Name : Olivia  
NPM : 2014330006  
Title : *The Relevance of 16 Volumes of President Joko Widodo's Economic Policy Packages in Easing FDI Access to Indonesia*

---

*Foreign Direct Investment (FDI) is one of the major contributing sources of Indonesia's economy. Therefore, Indonesia's President, Joko Widodo, launched Economic Policy Packages I-XVI to ease the access of FDI to Indonesia. However, to examine the effects of those economic policy packages, it is important to analyze the relevance between each of those 16 economic policy packages and determinants of FDI. Through this research paper, the research question can be formulated as follows, **"How are the 16 Volumes of President Joko Widodo's Economic Policy Packages relevant in easing FDI Access to Indonesia in 2014-2017?"***

*Generally, the determinants of FDI can be divided into push factors and pull factors. A government's policies can affect determinants in a country's pull factors, which can be classified into: economic conditions; a government's policies regarding FDI; natural resources and human resources; and infrastructure. Indonesia is a country with the fourth largest population in the world and with rich natural resources. Indonesia's economic condition is also progressing as one of the emerging market economies. Even though those advantages can attract foreign investment to Indonesia, there are several factors that hamper Indonesia's inward FDI. These obstacles are Indonesia's corruption rate, inefficient bureaucracy, financial access, and political risk in Indonesia. Furthermore, Indonesia's ease of doing business rate, which is the indicator for its investment climate, is still lagging far behind other neighbouring countries. This paper analyzes the relevance of policies derived from the 16 Volumes of Joko Widodo's Economic Policy Packages regarding each of the aforementioned determinants and obstacles.*

*Key words: FDI, Economic Policy Packages, foreign investment, Indonesia, FDI determinants, Indonesia's FDI obstacles*

## **Kata Pengantar**

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi ini yang berjudul “Relevansi 16 Jilid Paket Kebijakan Ekonomi Presiden Joko Widodo dalam Meningkatkan Arus Masuk FDI ke Indonesia.” Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik Strata Satu Universitas Katolik Parahyangan. Tentunya penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan dalam berbagai aspek. Saya menyadari akan kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu, saya berharap pembaca dapat memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun agar kemudian skripsi ini dapat diperbaiki segala kekurangannya.

Skripsi ini tersusun bukan hanya dari hasil kerja saya seorang diri. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, khususnya kepada:

1. Dr. Aknolt Kristian Pakpahan, selaku dosen pembimbing saya, terima kasih atas waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diluangkan untuk membimbing saya.
2. Seluruh dosen program studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan wawasan dan pengetahuan yang berharga.

3. Kedua orang tua saya yang tidak pernah mengeluh dan selalu suportif dalam mendukung putri bungsunya dalam seluruh jenjang pendidikannya.
4. Kedua kakak saya, Ida dan Stevani, dan seluruh kerabat yang tidak lelah-lelahnya merongrong dan memotivasi saya agar menyelesaikan skripsi ini secepat-cepatnya.
5. Teman-teman seperjuangan saya, Maria, Malvin, Elizabeth, dan Melisa, karena telah menemani malam-malam yang dihabiskan untuk mengerjakan tugas dan ketika saya butuh *refreshing* dari kepenatan perkuliahan.
6. Seluruh teman-teman angkatan HI Unpar 2014 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, namun telah membantu membimbing saya selama jenjang perkuliahan.

Demikian yang dapat saya sampaikan. Tak henti-hentinya saya mengucapkan terima kasih dan maaf bagi seluruh pihak yang terlibat dalam skripsi ini apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini yang tidak berkenan di hati. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak

Bandung, 3 Juli 2018



## Daftar Isi

<b>Abstrak</b> .....	i
<i>Abstract</i> .....	ii
<b>Kata Pengantar</b> .....	iii
<b>Daftar Isi</b> .....	v
<b>Daftar Tabel</b> .....	ix
<b>Daftar Grafik</b> .....	x
<b>Daftar Singkatan</b> .....	xi
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	5
1.2.1. Deskripsi Masalah .....	5
1.2.2. Pembatasan Masalah.....	10
1.2.3. Perumusan Masalah .....	11
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	11
1.3.2. Kegunaan Penelitian .....	11
1.4. Kajian Literatur .....	12
1.5. Kerangka Pemikiran.....	16
1.5.1. <i>Ecletic Paradigm</i> .....	16

1.5.2.	<i>Foreign Direct Investment (FDI)</i> .....	19
1.6.	Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	31
1.6.1.	Metode Penelitian .....	31
1.6.2.	Teknik Pengumpulan Data .....	32
1.7.	Sistematika Pembahasan .....	33
	<b>BAB II: DINAMIKA ARUS FDI DI INDONESIA</b> .....	35
2.1.	Gambaran Umum Arus FDI Indonesia .....	35
2.2.	Arus FDI pada Era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo.....	38
2.3.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Arus Masuk Indonesia.....	41
2.3.1.	Determinan FDI Indonesia .....	41
2.3.1.1.	Kondisi Perekonomian Indonesia.....	41
2.3.1.2.	Kebijakan Pemerintah Indonesia Terkait FDI.....	50
2.3.1.3.	Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia.....	52
2.3.1.4.	Infrastruktur.....	56
2.3.2.	Hambatan dalam Peningkatan Arus Masuk FDI ke Indonesia.....	59
2.3.2.1.	Korupsi di Indonesia .....	61
2.3.2.2.	Birokrasi Indonesia yang Tidak Efisien .....	64
2.3.2.3.	Akses Pembiayaan Investasi Indonesia.....	67
2.3.2.4.	Risiko Politik di Indonesia .....	70
2.3.2.5.	<i>Ease of Doing Business (EODB)</i> .....	72

### **BAB III: ANALISIS PAKET KEBIJAKAN EKONOMI PRESIDEN JOKO**

#### **WIDODO JILID I-XVI ..... 35**

#### 3.1. Analisis Relevansi 16 Jilid Paket Kebijakan Ekonomi Presiden Joko

##### Widodo terhadap Determinan dan Hambatan FDI Indonesia ..... 77

##### 3.1.1. Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I ..... 79

##### 3.1.2. Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II ..... 82

##### 3.1.3. Paket Kebijakan Ekonomi Jilid III ..... 83

##### 3.1.4. Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV ..... 85

##### 3.1.5. Paket Kebijakan Ekonomi Jilid V ..... 87

##### 3.1.6. Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VI ..... 89

##### 3.1.7. Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VII ..... 91

##### 3.1.8. Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VIII ..... 92

##### 3.1.9. Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IX ..... 95

##### 3.1.10. Paket Kebijakan Ekonomi Jilid X ..... 97

##### 3.1.11. Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XI ..... 98

##### 3.1.12. Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XII ..... 102

##### 3.1.13. Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIII ..... 104

##### 3.1.14. Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIV ..... 106

##### 3.1.15. Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XV ..... 108

##### 3.1.16. Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI ..... 110

<b>BAB IV: KESIMPULAN .....</b>	<b>115</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>121</b>

## Daftar Tabel

Tabel 1.1 Kebijakan Domestik yang Berpengaruh terhadap Preferensi TNC.....	28
Tabel 2.1 Perkembangan FDI Masuk di Indonesia.....	39
Tabel 2.2 PDB Indonesia Tahun 2009-2017.....	43
Tabel 2.3 Tingkat Inflasi Indonesia.....	52
Tabel 2.4 <i>Regulatory Performance Index Indonesia</i> .....	78
Tabel 4.1 Relevansi 16 Paket Kebijakan Ekonomi terhadap Determinan FDI...	129
Tabel 4.2 Relevansi 16 Paket Kebijakan Ekonomi terhadap Hambatan FDI.....	130

## Daftar Grafik

Grafik 2.1 Rasio Utang Terhadap PDB Indonesia.....	46
Grafik 2.2 UMR Jakarta.....	51
Grafik 2.3 Alokasi Belanja Infrastruktur Pemerintah Indonesia.....	68
Grafik 2.4 Faktor Masalah dalam Melakukan Bisnis di Indonesia.....	71
Grafik 2.5 Peringkat EODB Indonesia 2017.....	91
Grafik 2.6 Nilai DTF Indonesia 2017.....	92

### Daftar Singkatan

AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APEC	: <i>Asia-Pacific Economic Cooperation</i>
API	: Angka Pengenal Impor
ASEAN	: <i>Association of South East Asia Nations</i>
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BI	: Bank Indonesia
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
BNSP	: Badan Nasional Sertifikasi Profesi
BOP	: <i>Balance of Payment</i>
BPDP	: Badan Pengelola Dana Perkebunan
BPHTB	: Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPOM	: Badan Pengawasan Obat dan Makanan
BPS	: Badan Pusat Statistik

BTI	: <i>Bertelsmann Stiftung Transformation Index</i>
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CAD	: <i>Current Account Deficit</i>
DHE	: Devisa Hasil Ekspor
DIRE	: Dana Investasi <i>Real Estate</i>
DNI	: Daftar Negatif Investasi
DTF	: <i>Distance to Frontier</i>
EBT	: Energi Baru Terbarukan
EODB	: <i>Ease of Doing Business</i>
FDI	: <i>Foreign Direct Investment</i>
FTA	: <i>Free Trade Area</i>
FTZ	: <i>Free Trade Zone</i>
GDP	: <i>Gross Domestic Product</i>
GIR	: <i>Global Investment Report</i>
HDI	: <i>Human Development Index</i>
IAI	: Institut Akuntan Indonesia
ICOR	: <i>Incremental Capital Output Ratio</i>



IFC	: <i>International Finance Corporations</i>
IGT	: Informasi Geospasial Tematik
IIGF	: <i>Indonesia Infrastructure Guarantee Fund</i>
IMB	: Izin Mendirikan Bangunan
IMTKA	: Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
INSW	: <i>Indonesia National Single Window</i>
ISRM	: <i>Indonesia Single Risk Management</i>
Kadin	: Kamar Dagang Indonesia
KEK	: Kawasan Ekonomi Khusus
Kemenham	: Kementerian Hukum dan HAM
KHL	: Kebutuhan Hidup Layak
KIK	: Kontrak Investasi Kolektif
KLIK	: Kemudahan Langsung Investasi Konstruksi
KKN	: Korupsi, Kolusi, Nepotisme
KKS	: Kartu Keluarga Sejahtera
Kominfo	: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi

KPS	: Kemitraan Publik Swasta
KUR	: Kredit Usaha Rakyat
KURBE	: Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor
LPEI	: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
MA	: Mahkamah Agung
MBR	: Masyarakat Berpenghasilan Rendah
MK	: Mahkamah Konstitusi
NPL	: <i>Non-Performing Loan</i>
OECD	: <i>Organizations for Economic Cooperation and Development</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDB	: Produk Domestik Bruto
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
PP	: Peraturan Pemerintah
PPH	: Pajak Penghasilan

PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PT	: Perseroan Terbatas
PTSP	: Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PWC	: <i>Pricewaterhouse Coopers</i>
QE	: <i>Quantitative Easing</i>
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPI	: <i>Regulatory Performance Index</i>
RPTKA	: Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIUP	: Surat Izin Usaha Perdagangan
SIWAS	: Sistem Informasi Pengawasan
SKA	: Surat Keterangan Asal
SLF	: Sertifikat Laik Fungsi
SPPL	: Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan
SPR	: Sentra Peternakan Rakyat
TDG	: Tanda Daftar Gudang

TDP	: Tanda Daftar Perusahaan
TEPRA	: Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
TNC	: <i>Trans-National Corporation</i>
UKL/UPL	: Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
UKM	: Usaha Kecil dan Menengah
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UMKMK	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kreatif
UMR	: Upah Minimum Regional
UN	: <i>United Nations</i>
UNCTAD	: <i>United Nations Conference on Trade and Development</i>
UNDP	: <i>United Nations Development Programme</i>
WB	: <i>World Bank</i>
WEF	: <i>World Economic Forum</i>
WIR	: <i>World Investment Report</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Penanaman modal asing langsung yang biasa dikenal dengan *Foreign Direct Investment* (FDI) telah berkembang sebagai salah satu bentuk pertukaran modal utama dalam perdagangan internasional, terutama di era globalisasi. Pada masa paska Perang Dunia II, FDI secara global didominasi oleh Amerika Serikat, sementara negara-negara lain berusaha membangun kembali perekonomiannya setelah kerugian yang dialami selama masa Perang Dunia II. Perusahaan-perusahaan AS mengalami kemajuan teknologi yang membuat produk-produk mereka unggul dibandingkan produk lain di pasar internasional. Namun, FDI kini telah menjadi sebuah fenomena global yang bukan hanya didominasi oleh AS saja, namun memegang peranan penting dalam perekonomian global dengan tingkat FDI yang mencakup lebih dari 20% dari tingkat GDP global.<sup>1</sup> Pesatnya perkembangan FDI dalam perdagangan internasional disebabkan oleh berbagai faktor seperti kebijakan liberalisasi, maraknya integrasi perekonomian, liberalisasi tarif, dan biaya transportasi dan komunikasi yang berkurang akibat globalisasi. Seiring meningkatnya volume arus FDI, negara-negara yang berperan sebagai *host country* ataupun *source country* semakin meluas dan tidak hanya mencakup negara-negara maju. Negara-negara berkembang, dimana tingkat kompetisi masih rendah dan dengan rendahnya biaya faktor produksi serta sumber daya manusia,

---

<sup>1</sup> "Foreign Direct Investment," *China Daily*, 17 Oktober 2006, [http://www.chinadaily.com.cn/business/2006-10/17/content\\_710167.htm](http://www.chinadaily.com.cn/business/2006-10/17/content_710167.htm)

menjadi sebuah kesempatan bagi perusahaan-perusahaan untuk memperluas perusahaannya. Aliran arus FDI ke negara-negara berkembang semakin meningkat dan memiliki efek positif dalam meningkatkan perekonomian negara. Berdasarkan *World Investment Report 2017*, tingkat *inflow* FDI menuju negara berkembang mencakup 37% dari tingkat *inflow* FDI global dan tingkat *outflow* dari negara berkembang mencakup 56% dari tingkat *outflow* FDI global.<sup>2</sup>

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tiwari dan Mutascu pada tahun 2010, FDI dan ekspor secara positif meningkatkan perkembangan perekonomian di negara-negara Asia.<sup>3</sup> FDI dapat memberikan akses terhadap perluasan pasar, biaya produksi yang lebih rendah, perkembangan teknologi, perkembangan produk alternatif, peningkatan kualitas tenaga kerja.<sup>4</sup> FDI juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan negara melalui pajak, perkembangan kualitas sistem manajerial perusahaan dalam negara dan juga meningkatkan kompetisi. Negara-negara berkembang dan negara-negara miskin semakin sadar akan besarnya peran aliran masuk FDI untuk meningkatkan perekonomian negaranya. Maka, negara-negara tersebut semakin menekankan kepentingannya untuk menarik minat pihak asing untuk menanamkan modalnya di negara mereka. FDI merupakan salah satu isu yang berhubungan langsung dengan perkembangan perekonomian Indonesia. Peningkatan FDI dalam suatu negara, terutama untuk negara berkembang seperti Indonesia, berperan penting dalam perkembangan

---

<sup>2</sup> UNCTAD, *World Investment Report 2017* (Geneva:United Nations Publications, 2017), [http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2017\\_en.pdf](http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2017_en.pdf)

<sup>3</sup> Aviral Tiwari dan Mihai Mutascu, "Economic Growth and FDI in Asia: A Panel Data Approach," *MPRA Archive*, 28172 (2010): 11.

<sup>4</sup> Kenneth A. Froot, introduction to *Foreign Direct Investment*, (Chicago: University of Chicago Press, 1993), 1-12.

perekonomian suatu negara. Perusahaan-perusahaan dalam negara berkembang memerlukan dana dari para investor asing dan keahlian para tenaga kerja asing untuk meningkatkan penjualan perusahaan. Transfer teknologi yang terjadi karena adanya penanaman modal asing langsung merupakan keuntungan lain yang didapatkan perusahaan dalam negara berkembang melalui adanya FDI.

Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang di kawasan Asia Tenggara memiliki potensi yang luas untuk menjadi negara tujuan para investor asing. Apalagi mengingat kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia dan sumber daya manusia dalam jumlah besar yang dapat memikat para investor asing untuk menanam bisnisnya di Indonesia. Namun begitu, pada kenyataannya, pada tahun 2016, Indonesia masih menduduki posisi ke-109 sebagai negara penerima FDI di antara negara dunia dalam *Global Investment Ranking*.<sup>5</sup> Rendahnya minat negara investor untuk menanamkan modal di Indonesia terjadi karena berbagai hambatan yang ditemui para investor ketika ingin melakukan bisnis di Indonesia. Berbagai hambatan tersebut meliputi maraknya isu korupsi, tidak adanya transparansi, lemahnya sistem hukum, dan sulitnya birokrasi di Indonesia.<sup>6</sup> *Transparency International* menempatkan Indonesia dalam posisi ke-100 dari 183 negara sebagai negara dengan masalah transparansi tertinggi.<sup>7</sup> Melihat kondisi iklim bisnis di Indonesia yang tidak menjanjikan, banyak investor-investor asing yang akhirnya mengurungkan niat untuk menanamkan modal di Indonesia.

---

<sup>5</sup> “Jokowi Wants Indonesia’s Investment Rank Above 40,” *Tempo*, 23 Januari 2016, <https://en.tempo.co/read/news/2016/01/23/056738748/Jokowi-Wants-Indonesias-Investment-Rank-Above-40>

<sup>6</sup> OECD, *Indonesia Policy Brief 2016* (OECD Publishing, 2016), <http://www.oecd.org/indonesia/indonesia-improving-investment-climate.pdf>

<sup>7</sup> “Indonesia Investment, Trade Strategy, and Agreements Handbook,” *International Business Publications USA* (2016).

Peningkatan kualitas iklim bisnis di Indonesia dalam rangka menarik perhatian para investor asing menjadi isu yang dihadapi oleh para pemimpin Indonesia. Presiden Joko “Jokowi” Widodo, yang dilantik sebagai presiden Republik Indonesia pada tahun 2014 menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan sejumlah kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.<sup>8</sup> Untuk melaksanakan hal tersebut, Presiden Jokowi menyadari berbagai hambatan yang ada di Indonesia saat ini. Maka dari itu, dicanangkanlah Paket Kebijakan Ekonomi. Paket Kebijakan Ekonomi yang terdiri atas dua tahap tersebut bertujuan untuk mengatasi perlambatan perekonomian global yang berimbas terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik.<sup>9</sup> Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I dirilis pada 9 September 2015 yang dibagi menjadi tiga aspek penting. Pertama, menjaga daya beli masyarakat. Kedua, menarik kembali dana asing yang keluar secara masif. Ketiga, memacu pertumbuhan investasi baik asing maupun domestic melalui deregulasi dan debirokrasi. Sementara itu, Paket Kebijakan Ekonomi Tahap II dirilis pada tanggal 29 September 2015. Melalui paket ini, pemerintah berusaha menarik investor dengan memangkas perizinan yang seringkali menyulitkan proses pembangunan di Indonesia. Melalui paket kebijakan tersebut akan dibentuk badan yang dapat melayani pembentukan perizinan secara cepat hanya dalam waktu tiga jam di kawasan industri.

---

<sup>8</sup> Sakina Setiawan, “Paket Kebijakan Ekonomi Lengkap, tetapi Minim Implementasi,” *Kompas*, 20 Desember 2016,

<http://ekonomi.kompas.com/read/2016/12/20/181701126/paket.kebijakan.ekonomi.lengkap.tetapi.minim.implementasi>

<sup>9</sup> Kominfo, *Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II*,

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/6101/paket-kebijakan-ekonomi-jilid-ii/0/berita>



Paket Kebijakan Ekonomi yang dicanangkan Presiden Jokowi merupakan upaya pemerintah untuk menarik minat para investor asing untuk menanamkan modal bisnisnya di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis akan melihat bagaimana relevansi dari 16 jilid Paket Kebijakan Ekonomi tersebut terhadap tingkat FDI di Indonesia.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

### **1.2.1. Deskripsi Masalah**

Secara global ataupun regional, Indonesia mengalami ketertinggalan pembangunan dibandingkan negara-negara lain mengingat berbagai hambatan ekonomi maupun politik yang terjadi di Indonesia sejak masa kemerdekaannya pada tahun 1945. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut dan agar dapat bersaing dengan negara-negara lain di kawasannya, pemerintah Indonesia harus menyusun strategi kebijakan ekonomi ataupun politik yang dapat menempatkan Indonesia dalam posisi yang strategis. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih membutuhkan dana yang relatif besar untuk menjalankan pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas hidup rakyatnya. Sumber dana dalam negeri di Indonesia sendiri belum cukup untuk menjalankan berbagai strategi pembangunan yang telah direncanakan oleh negara. Maka dari itu, pemerintah Indonesia sadar bahwa di samping berupaya untuk menggali potensi dari pasar domestik, pemerintah juga perlu menarik sumber pembiayaan dari luar negeri, yang salah satunya dalam bentuk FDI. Dibandingkan dengan investasi asing dalam bentuk aliran bantuan atau modal portofolio, FDI dapat memberikan keuntungan yang lebih besar dalam menjamin kelangsungan pembangunan. Dengan adanya aliran

masuk FDI ke suatu negara, terutama negara berkembang seperti Indonesia, bantuan finansial dari FDI akan diikuti dengan berbagai keuntungan lain seperti transfer teknologi dan *management skills* yang juga dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Melihat tren arus FDI yang semakin meningkat ke negara-negara di kawasan Asia, Indonesia seharusnya dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menarik jumlah FDI yang lebih besar. Berdasarkan penelitian oleh *World Bank*, diperkirakan bahwa investasi asing di negara-negara berkembang akan mengalami peningkatan sekitar 7-10% per tahunnya.<sup>10</sup>

Berdasarkan *World Investment Report 2017* yang dilakukan oleh *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD), pada tahun 2016 persentasi stok FDI Indonesia mencapai 25,2% dari total GDP negara<sup>11</sup>, yang berarti FDI memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap GDP negara. Stok FDI yang masuk ke Indonesia sejak tahun 2014 sampai tahun 2016 memang terus mengalami kenaikan. Namun begitu apabila dibandingkan dengan stok FDI yang masuk ke Asia Tenggara pada tahun 2016, Indonesia hanya mencakup 12,5% dari total stok FDI masuk di Asia Tenggara. Hal tersebut berarti Indonesia masih kalah dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Vietnam. Padahal stok FDI yang masuk ke negara berkembang bernilai 33,96% dari stok FDI masuk di dunia.

Indonesia memiliki berbagai keuntungan yang menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman FDI yang strategis. Kekayaan alam dan

---

<sup>10</sup> Prakash Loungani dan Assaf Razin, "How Beneficial Is Foreign Direct Investment for Developing Countries?," *Finance and Development* 38, No. 2 (2001), <http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2001/06/loungani.htm>

<sup>11</sup> UNCTAD, *World Investment Report 2017*.

perkembangan pasar domestik yang positif di Indonesia merupakan beberapa faktor yang menjadi perhatian para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Investasi asing di Indonesia tersebar dalam berbagai sektor bisnis, seperti energi dan pertambangan, industri finansial, sektor agrikultur, telekomunikasi, media, dan berbagai sektor lainnya. Namun begitu, berbagai hambatan di Indonesia seringkali menyebabkan para investor asing untuk mengurungkan niatnya dalam menanamkan modal di Indonesia. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menuliskan definisi mengenai *FDI restrictiveness* atau tingkat hambatan dalam FDI, yaitu sebagai indeks yang digunakan OECD untuk mengukur tingkat kesulitan peraturan masuknya FDI ke dalam suatu negara dengan melihat empat jenis hambatan utama, yaitu hambatan ekuitas asing; penyaringan yang diskriminatif atau mekanisme persetujuan; hambatan dalam personel asing utama dan hambatan operasional.<sup>12</sup> Dalam indeks yang digunakan oleh OECD, tidak diperhitungkan mengenai tingkat transparansi dan diskresi dalam birokrasi suatu negara. Berdasarkan indeks tersebut, Indonesia mendapat nilai 0.315 dengan 0 sebagai nilai untuk negara dengan peraturan FDI yang terbuka dan 1 untuk nilai negara dengan peraturan FDI yang tertutup.<sup>13</sup> Dengan nilai tersebut, Indonesia menduduki posisi kelima dari bawah dalam tingkat *FDI restrictiveness* hanya mengungguli Republik Rakyat Tiongkok, Myanmar, Arab Saudi, dan Filipina. Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tergolong sebagai negara yang memiliki peraturan yang tidak terbuka terhadap masuknya FDI sehingga mempersulit FDI yang masuk dari pihak asing.

---

<sup>12</sup> OECD, "FDI Restrictiveness," <https://data.oecd.org/fdi/fdi-restrictiveness.htm#indicator-chart>

<sup>13</sup> Ibid.

Di Indonesia, FDI diatur dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal). Dalam pasal 6 UU tersebut, tercantum bahwa investasi asing dilarang dalam beberapa sektor yang menyangkut strategi keamanan nasional seperti produksi persenjataan, amunisi, bahan peledak, dan peralatan tempur lainnya. Namun, terdapat juga sektor-sektor lain yang dipertimbangkan sebagai industri yang krusial terhadap perekonomian negara dan tidak terbuka untuk kepemilikan pihak asing secara utuh. Sektor-sektor tersebut mencakup sektor pelabuhan, pengiriman, jalur rel, telekomunikasi, penerbangan, air minum, energi atom, dan media massa.<sup>14</sup> Selain itu, perusahaan asing juga seringkali menemui hambatan yang ketat dalam sektor-sektor jasa seperti usaha ritel, utilitas, dan keuangan. Keluhan-keluhan perusahaan asing dalam menanamkan modal di Indonesia juga terkait dengan sistem politik demokrasi desentralisasi di Indonesia. Berbagai regulasi yang membingungkan dinilai tidak bersahabat dan justru menghambat terhadap masuknya perusahaan asing ke Indonesia. Republik Rakyat Tiongkok, sebagai salah satu negara utama yang diharapkan oleh Indonesia untuk berkontribusi dalam arus masuk Indonesia memiliki kekhawatiran mengenai sentimen anti-Tiongkok di negara Indonesia yang didominasi oleh penduduk beragama Islam. Selain itu, salah satu perusahaan asal Tiongkok, *China Road and Bridge Corporation*, juga melaporkan bahwa proyek infrastruktur yang berskala besar membutuhkan berbagai persetujuan baik dari pemerintah lokal maupun nasional yang seringkali mengalami konflik satu

---

<sup>14</sup> Karen Mills, "Indonesia's Ongoing Deregulation of Direct Foreign Investment," *East Asian Executive Reports* 18, No.1 (1996): 9.

sama lain.<sup>15</sup> Hal tersebut menyebabkan tertundanya pembangunan berbagai proyek yang dilakukan dengan kerjasama dengan pihak asing. Hambatan bisnis lain di Indonesia menyangkut lemahnya ketertiban dan penegakan hukum dimana masih ada banyak wilayah di Indonesia yang rawan akan gangguan keamanan yang membuat para investor enggan untuk masuk. Persoalan lainnya terkait infrastruktur di Indonesia yang belum memadai sehingga mempengaruhi biaya operasional bisnis yang meningkat. Kendala lain menyangkut ketersediaan tenaga kerja terlatih di Indonesia, yang menjadi hambatan bagi perusahaan asing yang ingin melakukan bisnis di Indonesia namun tidak dapat memanfaatkan tenaga kerja Indonesia.

Berbagai hambatan yang diterapkan di Indonesia dilakukan karena pemerintah memiliki kekhawatiran terhadap perusahaan asing. Perusahaan asing dapat mencari kesempatan untuk mengeksploitasi *loophole* dalam peraturan yang ada, sehingga dapat menyebabkan kerugian dalam negara. Selain itu, dikhawatirkan pula masuknya pihak perusahaan asing akan menghambat perkembangan industri dalam negeri; menyebabkan kerusakan lingkungan; atau tidak beroperasi sesuai hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Namun begitu, berbagai keuntungan yang dapat dihasilkan dari arus masuk FDI ke Indonesia jauh melebihi resiko-resiko yang dapat disebabkan oleh masuknya investasi asing ke Indonesia. Maka dari itu, pemerintah harus berperan aktif dalam mengurangi hambatan-hambatan di Indonesia yang berpengaruh terhadap tingkat arus masuk FDI ke Indonesia.

---

<sup>15</sup> Bland Ben, "Chinese Investors Hesitate over Indonesia Investment," *FT.com*, 15 Juni 2017.

Berbagai keuntungan yang dapat diterima dari meningkatnya arus masuk FDI ke Indonesia memotivasi Presiden Joko Widodo untuk mencanangkan Paket Kebijakan Ekonomi. Paket Kebijakan Ekonomi jilid I-XVI yang telah dirilis sampai dengan bulan Agustus 2017 bertujuan untuk meningkatkan arus masuk FDI ke Indonesia dengan menghapus atau mengurangi hambatan-hambatan berinvestasi di Indonesia. Dengan adanya peningkatan investasi asing, Indonesia dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur yang selama ini tertinggal dari negara-negara tetangganya. Kebijakan-kebijakan yang dimuat dalam 16 jilid Paket Kebijakan Ekonomi Presiden Joko Widodo bukan hanya menguntungkan investor asing, namun juga mempertimbangkan pengusaha lokal dan membantu meningkatkan daya saing pengusaha lokal.

### **1.2.2. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penulisan penelitian mengenai relevansi Paket Kebijakan Ekonomi yang dicanangkan Presiden Indonesia, Joko Widodo, terhadap tingkat arus masuk ke Indonesia diterapkan dalam periode 2014-2017. Masalah yang akan dibahas yaitu mengenai 16 jilid dari Paket Kebijakan Ekonomi yang relevan dalam mempermudah akses FDI ke Indonesia. Analisis dalam penelitian ini hanya akan menggunakan konsep *pull factors* dalam determinan FDI. Sementara untuk mengevaluasi 16 jilid Paket Kebijakan Ekonomi tersebut, akan digunakan penggabungan sumber teori dan konsep dari penulis Aykut dan Ratha (2003) dan dari laporan *Global Competitiveness Report* 2017.

### **1.2.3. Perumusan Masalah**

Melihat latar belakang masalah, deskripsi masalah, dan pembatasan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis berhasil merumuskan pertanyaan penelitian yang relevan untuk diteliti yaitu *“Bagaimana relevansi 16 Jilid Paket Kebijakan Ekonomi Presiden Joko Widodo dalam mempermudah akses Foreign Direct Investment (FDI) ke Indonesia dalam periode 2014-2017?”*

## **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan relevansi 16 jilid dari Paket Kebijakan Ekonomi Presiden Joko Widodo dalam mempermudah akses FDI ke Indonesia pada periode 2014-2016. Selain itu, tujuan berikut dari penulisan laporan penelitian ini adalah untuk memenuhi syarat kelulusan penulis dalam menempuh studi Strata-1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan manfaat secara teoretis, yang mana hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran terhadap ilmu Hubungan Internasional, terutama yang terkait dengan studi ekonomi politik internasional, perekonomian Indonesia, dan politik bisnis internasional. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat berguna secara praktis bagi lembaga pemerintahan, baik di dalam maupun luar negeri, untuk

menilai dampak dan relevansi kebijakan negara terhadap aliran FDI. Kemudian bagi para akademisi, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dengan topik yang terkait. Terakhir, adapun kegunaan penelitian ini terhadap penulis sendiri yaitu menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai kajian ekonomi politik internasional yang terkait dengan topik penelitian ini.

#### **1.4. Kajian Literatur**

Razin dan Sadka (2012) membahas mengenai argumen terkait dampak positif dan negatif dari FDI dalam bukunya "*Foreign Direct Investment: Analysis of Aggregate Flows*". Menurut Razin, arus modal internasional telah meningkat secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir, dan peningkatan yang terbesar terjadi dalam bentuk FDI. Hal tersebut berlaku bukan hanya bagi negara maju, namun juga bagi negara berkembang. Aliran FDI tersebut dianggap penting karena FDI memiliki beberapa keuntungan dibandingkan bentuk aliran modal lainnya. Pertama, FDI bersifat lebih stabil dan tidak mengakibatkan krisis finansial bagi negara penerimanya. Kedua, FDI dapat mengakibatkan terjadinya transfer teknologi yang merupakan keuntungan bagi negara penerimanya. Ketiga, Razin berargumen bahwa FDI dapat berperan dalam mendisiplinkan pemerintah negara penerima FDI untuk memenuhi kebutuhan para penanam modal asing. FDI memang seringkali diasosiasikan dengan kerugian domestik dimana kepemilikan asing dapat menyebabkan ketidakstabilan politik di negara penerima, terutama di negara yang kaya akan SDA.



Penelitian mengenai dampak kebijakan suatu negara terhadap aliran FDI yang masuk ke negara telah dilakukan dalam berbagai kasus. Apalagi melihat tren FDI yang semakin meningkat di berbagai negara di dunia. Pemerintah berbagai negara berlomba-lomba untuk mengubah kebijakan yang ada ataupun menambah kebijakan baru untuk menarik minat para investor asing guna meningkatkan perekonomian negaranya. Salah satu buku yang menarik untuk dikaji terkait dengan topik tersebut yaitu “*Determinants of Foreign Direct Investment in Ghana*” oleh Tsikata, Asante, dan Gyasi (2000). Dalam buku tersebut, dibahas mengenai faktor-faktor yang menjadi determinan dari FDI di Ghana. Ghana, layaknya Indonesia, merupakan negara berkembang yang berlokasi di wilayah Afrika. Penulis membahas bagaimana di Ghana terjadi pergantian sistem politik dan berikut kebijakan negara neo-Marxist dari administrasi Rawling, yang notabene anti-FDI, ke sistem pemerintahan yang sangat antusias dalam menyambut FDI sebagai komponen utama dalam mesin penggerak pertumbuhan.<sup>16</sup> Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dalam buku tersebut, ditemukan hasil bahwa kegagalan birokrasi merupakan hambatan utama dari proses investasi pihak asing di Ghana. Dalam fase persiapan investasi, akuisisi tanah dan registrasi menjadi proses yang membingungkan dan seringkali terjadi kecurangan oleh pihak dalam negeri dalam prosesnya. Terjadinya berbagai kecurangan tersebut kemudian menjadi faktor yang menghilangkan motivasi negara lain untuk menanamkan modalnya di Ghana. Maka dari itu, penting bagi pemerintah untuk menciptakan sistem hukum dan regulasi yang jelas, terutama

---

<sup>16</sup> G. Kwaku Tsikata, Yaw Asante, dan E. M. Gyasi, *Determinants of Foreign Direct Investment in Ghana* (London: Overseas Development Institute, 2000), <https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/8125.pdf>

dalam hal akuisisi tanah dan prosedur kepemilikan. Terakhir dalam buku tersebut disimpulkan bahwa prasyarat yang terutama untuk meningkatkan FDI berakar dari formulasi kebijakan FDI yang kondusif dan jelas, serta implementasi kebijakan yang efisien dalam lingkungan yang stabil secara politik-ekonomi.

Li Ben (2002) melakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap berbagai perubahan kebijakan Tiongkok terhadap FDI sejak tahun 1979. Perkembangan sistem legislasi “Market Economic” yang terkait dengan investasi asing menjadi fondasi awal reformasi kebijakan di Tiongkok untuk menerima investasi asing.<sup>17</sup> Tiongkok telah menjadi negara kedua setelah Amerika Serikat yang menerima FDI dengan jumlah terbesar secara global. FDI juga telah berperan penting dalam perkembangan perekonomian Tiongkok. Seiring bertumbuhnya tingkat FDI di Tiongkok, maka sistem legislasi terkait investasi asing juga terus diperbaharui dan disempurnakan untuk meningkatkan kerjasama internasional namun tetap melindungi perekonomian domestik. Sikap Tiongkok terhadap investasi asing terutama mengalami perubahan yang positif sejak masuknya Tiongkok ke WTO dan APEC. Reformasi kebijakan tersebut penting untuk dilakukan untuk meningkatkan perekonomian negara melalui berbagai kerjasama internasional.

Gopalan, Hattari, dan Rajan (2016) melakukan sebuah penelitian terkait tren mengenai berbagai jenis arus FDI di Indonesia dalam tulisan berjudul “*Understanding foreign direct investment in Indonesia*”. Penulis menyatakan bahwa terdapat kekhawatiran yang semakin meningkat terkait terjadinya stagnasi

---

<sup>17</sup> Li Ben, “Alternation of legislation of foreign investment in China,” *International Journal of Law and Management* 51, No. 4 (2009): 220-225.

pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu kebijakan yang diadopsi pemerintah dalam rangka meningkatkan perekonomian Indonesia adalah untuk menarik *inflow* FDI yang lebih besar. Tulisan tersebut juga menjelaskan dinamika FDI di Indonesia dan memberikan rekomendasi kebijakan terkait peningkatan FDI di Indonesia. Indonesia merupakan destinasi investasi yang menjanjikan, namun Indonesia sama sekali tidak dianggap sebagai negara investor yang menjanjikan. Padahal negara lain di kawasan Asia, seperti Tiongkok dan India berada dalam posisi sepuluh teratas. Dalam konteks tersebut, penulis menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah mengambil langkah yang benar dalam merancang kebijakan yang akan meningkatkan posisi Indonesia dalam investasi secara global.

Rajenthiran (2002) menulis sebuah penelitian yang berjudul “*Indonesia: An Overview of The Legal Framework for Foreign Direct Investment*”. Dalam tulisan tersebut, dibahas mengenai UU Investasi Asing yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang FDI pada tahun 1967. Dewasa ini, beberapa peraturan dan regulasi telah diubah, dihapus, atau ditambahkan ke dalam kebijakan luar negeri Indonesia untuk menarik FDI yang lebih besar. Walaupun begitu, kerangka hukum di Indonesia terkait FDI dan implementasinya dipandang lemah dan tidak mencukupi. Terutama sejak terjadinya krisis finansial pada tahun 1997, tingkat kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Indonesia telah berkurang secara signifikan. Untuk mengembalikan kepercayaan investor, pemerintah Indonesia harus membuat kerangka hukum terkait FDI yang jelas dan dengan implementasi yang baik.

Berdasarkan kajian literatur yang telah dibahas, dapat dilihat bagaimana perilaku Indonesia dan negara-negara berkembang lain terhadap FDI. Kajian literatur tersebut akan membantu sebagai referensi dan untuk dianalisa secara lebih mendalam dalam penelitian ini dan akan dijabarkan dalam bagian-bagian berikutnya.

### **1.5. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan bagian penulisan yang menjelaskan mengenai teori dan konsep yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan digunakan sebagai referensi dalam penulisan penelitian ini. Kemudian akan dijelaskan pula mengenai aplikasi teori dan konsep tersebut terhadap kasus yang akan dibahas dalam penelitian. Dalam penulisan penelitian ini, akan digunakan beberapa teori dan konsep, yaitu teori *Eclectic Paradigm* dan konsep *Foreign Direct Investment* (FDI).

#### **1.5.1. *Eclectic Paradigm***

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Eclectic Paradigm* atau yang dikenal juga sebagai OLI Model atau Paradigma OLI yang dikembangkan oleh John Dunning. Paradigma OLI ini memberikan kerangka teoristik yang dapat menjelaskan fenomena FDI dan motivasi perusahaan di balik FDI secara terpadu. Teori ini tidak hanya menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan sebuah perusahaan untuk melakukan ekspansi ke luar negeri, namun teori ini juga memberi penjelasan mengenai pertumbuhan perusahaan tersebut setelah

melakukan ekspansi.<sup>18</sup> Hal tersebut membuat teori ini cocok untuk diaplikasikan dalam penelitian ini. Untuk memahami relevansi sebuah kebijakan terhadap FDI, maka kita perlu mengerti terlebih dahulu mengenai determinan-determinan yang menentukan keputusan sebuah perusahaan asing untuk menanamkan modalnya di suatu negara. Dengan demikian, penulis dapat melakukan analisis mengenai apakah sebuah kebijakan, dalam kasus ini Paket Kebijakan Ekonomi Presiden Joko Widodo, relevan atau tidak terhadap arus FDI yang masuk ke Indonesia.

Proposisi dasar dari paradigma OLI yaitu pola produksi internasional (produksi yang dibiayai oleh FDI dan dilaksanakan oleh *Trans National Corporation*) ditentukan oleh tiga konfigurasi yaitu<sup>19</sup>:

- a. Keuntungan *Ownership* (O) atau kepemilikan yang mengindikasikan siapa yang akan melakukan produksi di luar negeri dan aktivitas internasional lainnya. Keuntungan ini dapat berasal dari adanya akses perusahaan terhadap suatu aset di negara lain yang memberikan keuntungan terhadap perusahaan tersebut dibandingkan kompetitornya;
- b. Keuntungan Lokasi (L) yang mempengaruhi bagaimana sebuah perusahaan memutuskan lokasi untuk menjalankan aktivitas produksi yang menguntungkan di luar batas negaranya;
- c. Keuntungan Internalisasi (I) yang menyangkut pertanyaan mengapa perusahaan memilih untuk melakukan FDI dibandingkan menyewakan atau menjual aset mereka kepada perusahaan asing?

---

<sup>18</sup> John H. Dunning, "The Eclectic (OLI) Paradigm of International Production: Past, Present and Future," *International Journal of the Economics of Business* 8, No. 2 (2001): 173-190.

<sup>19</sup> Ibid.

Sebagai prasyarat, untuk dapat berkompetisi di negara lain, sebuah perusahaan harus memiliki keuntungan kompetitif atau monopolistik yang dapat menutupi biaya tambahan yang muncul dari pendirian perusahaan dan operasional di negara lain. Sementara sebuah perusahaan domestik tidak perlu menanggung biaya-biaya tambahan tersebut. Prasyarat kedua dari produksi internasional yaitu sebuah perusahaan harus mendapat keuntungan dengan melakukan perpindahan kepemilikan dalam perusahaan ke negara lain, daripada menjualnya ke pihak ketiga melalui *licensing* atau *franchising*.<sup>20</sup> Faktor internalisasi ini merupakan pilihan antara melakukan investasi di negara lain atau menjual kepemilikan perusahaan guna memanfaatkan keuntungan 'O'. Ketiga, paradigma eklektik membahas mengenai lokasi produksi. TNC akan memilih untuk melakukan produksi di luar negeri apabila perusahaan dapat memindahkan produk intermediat di negara asal ke negara lain dan memiliki keuntungan lebih.<sup>21</sup> Keuntungan lokasi mencakup adanya sumbangan dan ketersediaan tempat, faktor geografis, atau adanya intervensi publik terhadap alokasi sumber daya. Selain itu, keuntungan lokasi yang dimaksud di sini bukan hanya mengenai sumber daya alam yang terdapat di negara tujuan saja, namun kebijakan ekonomi dan institusi yang bergerak dalam negara tujuan juga menjadi salah satu faktor yang menentukan keuntungan lokasi bagi TNC.

---

<sup>20</sup> Carmen R. Stoian dan Fragkiskos Filippaios, "Dunning's Eclectic Paradigm: A Holistic, Yet Context Specific Framework for Analysing the Determinants of outward FDI," *International Business Review* 17, No. 3 (2008): 349-367, <https://kar.kent.ac.uk/9871/1/IBRRRevisedLast.pdf>

<sup>21</sup>Ibid.

Walaupun ketiga faktor tersebut dijelaskan secara independen, namun dalam paradigma OLI, ketiga faktor tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain dan saling mempengaruhi satu sama lain.

### **1.5.2. Foreign Direct Investment (FDI)**

#### **Definisi FDI**

Menurut I. Moosa dalam buku “*Foreign Direct Investment: Theory, Evidence, and Practice*”, FDI dapat didefinisikan sebagai suatu proses dimana suatu negara (*source country*) mendapatkan kepemilikan asset dengan tujuan mengendalikan produksi, distribusi, dan aktivitas lain dari sebuah perusahaan di negara lain (*host country*).<sup>22</sup> Sementara *International Monetary Fund* (IMF) mendefinisikan FDI sebagai sebuah investasi yang dilakukan untuk mendapatkan suku bunga berlangsung dalam sebuah perusahaan yang beroperasi dalam perekonomian suatu negara yang berbeda (*host country*) dengan negara asal investor (*source country*).<sup>23</sup> Dalam *World Investment Report 1999*, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan FDI sebagai investasi yang menyangkut hubungan jangka panjang dan merefleksikan kepentingan dan adanya kontrol dari suatu entitas dalam suatu negara (penanam modal asing langsung atau perusahaan induk) terhadap entitas lain dalam negara selain negara investor.<sup>24</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa salah satu faktor yang membedakan FDI dengan bentuk investasi asing lainnya adalah adanya elemen kontrol yang dilakukan pihak investor terhadap penerima investasi. Hal tersebut berarti investor

---

<sup>22</sup> Imad A. Moosa, *Foreign Direct Investment: Theory, Evidence, and Practice* (New York: Palgrave, 2002).

<sup>23</sup> OECD, “OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment.”

<sup>24</sup> Laura Alfaro, et al., “How Does Foreign Direct Investment Promote Economic Growth?” *JEL Classifications* (2006).

akan memiliki peran dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan dan strategi manajemen.

### **Determinan FDI**

Dalam melakukan analisis terhadap kebijakan pemerintah Indonesia terkait arus masuk FDI Indonesia, maka penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi determinan masuknya FDI ke Indonesia. Pertanyaan mendasar yang harus dijawab yaitu mengapa sebuah perusahaan lebih memilih untuk melakukan kegiatannya di pasar asing dibandingkan melakukan ekspor atau pilihan lain. Aykut dan Ratha (2003) melakukan penelitian terhadap determinan FDI di negara-negara berkembang di Asia dan mengelompokkan determinan FDI ke dalam dua kelompok yaitu, faktor penarik (*pull factors*) dan faktor pendorong (*push factors*).<sup>25</sup> *Pull factors* adalah karakteristik makro maupun mikro dari perekonomian sebuah *host country* yang menarik FDI dan terkait dengan arus masuk FDI, sementara *push factors* adalah karakteristik dari perekonomian sebuah *home country* yang mendorong keluar FDI ke negara tujuan dan terkait dengan arus keluar FDI.

*Pull factors* terdiri dari kondisi perekonomian, kebijakan pemerintah, sumber daya, dan infrastruktur. Sementara *push factors* terdiri dari ekspor, impor, kebijakan pemerintah *home country* terkait investasi, kebijakan ekspansif perusahaan dan kondisi perekonomian domestik.<sup>26</sup> Tingkat ekspor yang tinggi dalam suatu negara merupakan indikasi bahwa produk dari negara tersebut memiliki daya saing yang baik di negara lain. Dengan begitu, perusahaan tersebut

---

<sup>25</sup> Aykut, Dick & Dilip, Ratha, "South-South FDI Flows: How Big Are They?," *Transnational Corporations* 13 No.1 (2003): 168.

<sup>26</sup> Ibid.



dapat lebih yakin akan kondisi pasar di negara lain dan mengurangi risiko dan ketidakpastian dalam menanamkan FDI di negara lain. Sementara apabila suatu negara memiliki tingkat ekspor yang rendah, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa produk dari negara tersebut tidak diterima dengan baik di negara lain dan bukan merupakan kesempatan yang baik untuk melakukan ekspansi dengan memperluas kegiatan produksi di negara lain. Dengan melihat tingkat ekspor tersebut, suatu perusahaan dapat melihat apakah produk dari perusahaan tersebut akan diterima dengan baik di negara lain. Hal tersebut berpengaruh terhadap keputusan suatu perusahaan untuk menanamkan modalnya di negara lain dan lokasi negara yang akan menjadi *host country*. Selain tingkat ekspor, tingkat impor suatu negara juga merupakan *push factor* yang mendorong suatu perusahaan untuk menanamkan FDI di negara lain. Dengan berbagai kebijakan liberalisasi perdagangan di Indonesia, semakin banyak produk dari negara lain masuk ke Indonesia. Tingkat impor yang tinggi tersebut dapat mendorong sebuah perusahaan untuk memperluas pangsa pasarnya dan menanamkan modalnya di negara lain. *Push factor* ketiga yaitu kondisi perekonomian dalam negeri. Kondisi perekonomian domestik yang menurun dapat berpengaruh terhadap berbagai faktor produksi yang terlibat dalam kegiatan produksi suatu perusahaan. Dengan begitu, kegiatan produksi dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien apabila perusahaan tersebut melakukan ekspansi ke negara lain. Sementara dalam kondisi perekonomian domestik yang baik dan perusahaan dapat mencapai keuntungan yang optimal dalam negeri maka perusahaan tersebut mungkin tidak akan merasakan kebutuhan untuk memperluas perusahaannya ke negara lain.

### **Kondisi Perekonomian Negara**

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikasi utama dari ukuran perekonomian suatu negara dan merupakan faktor penting yang menentukan arus masuk FDI suatu negara. Perekonomian negara yang baik dapat memberikan kesempatan yang lebih besar terhadap para investor asing untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dari ekspansi perusahaan yang dilakukan. PDB dihitung berdasarkan nilai dari produksi seluruh barang dan jasa dalam suatu negara dalam periode waktu tertentu.<sup>27</sup> Perekonomian yang besar tidak hanya menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih dinamis tapi juga dapat menyediakan peluang yang lebih besar untuk diversifikasi ekonomi. Dalam laporan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, disimpulkan bahwa peningkatan PDB yang mengindikasikan adanya penambahan besarnya pasar berpengaruh secara signifikan terhadap arus masuk FDI di negara-negara Asia Tenggara, Korea, Tiongkok, dan India.<sup>28</sup>

Selain melihat PDB sebagai indikasi kondisi perekonomian suatu negara, kondisi stabilitas perekonomian suatu negara juga berperan besar sebagai salah satu determinan masuknya FDI. Stabilitas ekonomi suatu negara akan memperkuat perekonomian negara tersebut. Faktor-faktor stabilitas ekonomi yang menentukan masuknya FDI yaitu:

---

<sup>27</sup> Guritno Mangkusubroto dan Algifari, *Teori Ekonomi Makro* (Yogyakarta: STIE YKPN, 1998): 19-25.

<sup>28</sup> Yati Kurniati, Andry Prasmuko, dan Yanfitri, "Determinan FDI," *Working Paper* No. 6 (2007), [https://www.bi.go.id/id/publikasi/lain/kertas-kerja/Pages/WP\\_06\\_2007.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/lain/kertas-kerja/Pages/WP_06_2007.aspx).

a. Rasio utang-PDB

Peningkatan utang suatu negara yang tidak sesuai dengan peningkatan PDB negara tersebut dapat menyebabkan kondisi perekonomian negara yang tidak stabil. Ketidakstabilan kondisi perekonomian tersebut dapat memunculkan risiko yang lebih besar bagi para investor asing untuk menanamkan modalnya di negara tersebut. Dalam kondisi tersebut, maka pemerintah harus berusaha untuk mengurangi utang dan menyesuaikannya terhadap rasio PDB, dengan begitu maka tingkat kestabilan perekonomian akan meningkat dan begitu pula halnya dengan arus masuk FDI. Tingkat utang negara juga memperlihatkan kemampuan suatu negara untuk membayar utangnya ke negara lain dan mengindikasikan sebuah perekonomian yang berfokus pada pengurangan utang. Kondisi perekonomian tersebut akan dianggap tidak menarik di mata para investor asing.

b. Kesejahteraan buruh

Kesejahteraan buruh yang dimaksudkan merujuk pada kondisi tenaga kerja di suatu negara, dan hubungan antara perusahaan dan buruh secara umum. Kondisi kesejahteraan buruh yang buruk dalam suatu negara akan menyebabkan maraknya perselisihan dan demonstrasi buruh. Kerapnya terjadi perselisihan buruh akan meningkatkan biaya produksi karena meningkatnya upah buruh atau terjadinya mogok kerja yang menghambat proses produksi dalam suatu perusahaan. Maka dari itu, kondisi kesejahteraan buruh berpotensi berperan sebagai salah satu penghambat masuknya FDI. Investor

asing akan lebih memilih untuk melakukan investasi di lokasi dimana ketersediaan buruh dapat terjamin dan perselisihan buruh jarang terjadi.

c. Tingkat inflasi

Inflasi dapat membahayakan kestabilan perekonomian *host country*. Inflasi juga merupakan indikasi dari adanya ketegangan dalam perekonomian dalam negeri. Dalam kondisi tersebut, maka para investor asing akan lebih enggan untuk menanamkan FDI karena tidak dapat memaksimalkan keuntungannya di negara tersebut.

d. Defisit dalam *balance of payment*

*Balance of payment* adalah catatan seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara, baik individu, perusahaan, ataupun badan negara dalam periode waktu tertentu.<sup>29</sup> *Balance of payment* memberikan data yang rinci mengenai permintaan dan penawaran mata uang suatu negara. Selain itu, *balance of payment* juga menunjukkan potensi suatu negara untuk melakukan kerja sama ekonomi. Adanya defisit yang besar dalam *balance of payment* menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki anggaran yang tidak dapat dipenuhi oleh kemampuan ekonominya. Maka dari itu, negara tersebut tidak akan dapat meningkatkan impor barang dan jasa dari negara lain dan berkemungkinan menerapkan kebijakan proteksionisme untuk membatasi impor dalam rangka memperbaiki kondisi *balance of payment* negaranya. Hal tersebut dapat menjadi risiko yang nyata bagi para investor asing untuk menanamkan modalnya di negara tersebut.

---

<sup>29</sup> IMF, *Balance of Payments Manual*, <https://www.imf.org/external/pubs/ft/bopman/bopman.pdf>.

Kondisi perekonomian suatu negara juga dapat dinilai dengan melihat kondisi nilai tukar mata uang negara tersebut. Aliber (1970) dan Moosa (2002) mengajukan sebuah hipotesis yang menjelaskan pengaruh kekuatan mata uang terhadap FDI. Berdasarkan hipotesis tersebut, perusahaan di negara yang memiliki mata uang yang kuat lebih berpotensi untuk melakukan investasi di negara lain, sementara perusahaan di negara yang memiliki nilai tukar mata uang yang lemah tidak memiliki potensi yang sama.<sup>30</sup> Dengan kata lain, negara dengan mata uang yang kuat lebih berpotensi untuk menjadi *home country* dan menanamkan modalnya di negara lain, terutama di negara yang memiliki mata uang yang lemah (*host country*). Perusahaan akan melakukan kegiatan produksinya di negara dengan mata uang yang lemah karena biaya produksi yang lebih rendah tapi memilih untuk menjual produknya di negara dengan mata uang yang kuat. Besarnya pengaruh nilai tukar terhadap FDI juga bergantung pada tujuan barang tersebut diproduksi. Apabila barang yang diproduksi ditujukan untuk pasar di *host country* maka apresiasi nilai mata uang *host country* akan meningkatkan arus masuk FDI. Namun, apabila barang yang diproduksi di *host country* ditujukan untuk ekspor dan hanya kegiatan produksi yang dilakukan di *host country*, maka apresiasi nilai mata uang *host country* justru akan mengurangi tingkat arus masuk FDI karena dapat meningkatkan biaya produksi di negara tersebut dan mengakibatkan investasi di negara tersebut relatif lebih mahal dibandingkan di negara lain atau bahkan di *home country* itu sendiri.

---

<sup>30</sup> Kurniawan Dedy Cahyono, "Determinan FDI dan Pengaruhnya Terhadap PDB Indonesia," Tesis Magister, Institut Pertanian Bogor, 2013, <http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/66993/1/2013kdc.pdf>.

Indikasi lain dari kondisi perekonomian negara yaitu tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga merupakan salah satu faktor penentu dalam pengambilan keputusan investasi asing. Tingkat suku bunga merupakan bagian dari biaya yang harus dikeluarkan sebuah perusahaan untuk melakukan investasi di negara lain. Agar investasi yang dilakukan sebuah perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang maksimal maka biaya yang dikeluarkan tidak boleh melebihi keuntungan yang didapatkan. Maka dari itu, tingkat suku bunga yang tinggi di *host country* dapat membuat sebuah perusahaan cenderung lebih enggan untuk melakukan investasi di negara tersebut karena dapat meningkatkan biaya produksi. Sementara tingkat suku bunga yang rendah akan meningkatkan arus masuk FDI suatu negara. Tingkat suku bunga yang dimaksud dalam kasus ini adalah tingkat suku bunga riil. Tingkat suku bunga riil adalah tingkat suku bunga yang memperhitungkan tingkat suku bunga nominal dan tingkat inflasi. Dengan melihat tingkat suku bunga riil, maka biaya produksi dapat dihitung secara lebih akurat.

### **Kebijakan Pemerintah**

Kebijakan pemerintah menjadi salah satu determinan FDI karena pemerintah mengerti akan kontribusi FDI terhadap perekonomian negara. Pemerintah menganggap FDI sebagai salah satu faktor dalam mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan tingkat pertumbuhan perekonomian negara. Strategi suatu pemerintah dalam menentukan kebijakan negaranya terkait FDI merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi tingkat FDI negara tersebut, baik terhadap perusahaan yang berpotensi menanamkan modal di negara tersebut ataupun perusahaan yang telah menanam modal di negara tersebut. Maka

dari itu, Velde (2001) mengembangkan teori mengenai Peran Pemerintah dalam Tingkat FDI Negara. Menurut Velde, *Trans-National Corporation* (TNC) sebagai penanam modal akan memilih negara tujuan penanaman modal berdasarkan berbagai faktor.<sup>31</sup> Peran kebijakan ekonomi suatu negara semakin berkembang seiring berkembangnya liberalisasi FDI dan maraknya praktek '*footloose*'. Velde memetakan kebijakan ekonomi suatu negara yang berpengaruh terhadap preferensi TNC dalam tabel sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Dirk Willem te Velde, "Government Policies Towards Inward Foreign Direct Investment in Developing Countries: Implications for human capital formation and income inequality," *OECD Development Center* (2001).

Tabel 1.1 Kebijakan Domestik yang Berpengaruh terhadap Preferensi TNC

Kebijakan Ekonomi Domestik		Kebijakan dan Faktor Lain
Kebijakan Industrial	Kebijakan Makro Ekonomi	
- Insentif fiskal dan finansial	- Ketersediaan infrastruktur dan tenaga kerja ahli	- Biaya transportasi dan integrasi ekonomi regional atau global
- Prosedur administrasi yang efektif dan peraturan mengenai kepemilikan	- Hubungan dengan buruh yang baik	- Perjanjian bilateral, regional, dan internasional
- Promosi, <i>targeting</i> , dan <i>image building</i>	- Prospek dan performa makro-ekonomi yang baik	- Tingkat risiko politik dan asuransi
- Pengembangan sektor utama	- Kesempatan privatisasi	- Lokasi dengan pasar yang luas dan kaya
- Pengembangan platform ekspor (EPZ)	- Perkembangan pasar modal	- Ketersediaan sumber daya alam
	- Posisi utang eksternal	- Hubungan historis dan bahasa
	- Halangan barang dan jasa	- Korupsi dan konflik
		- Kondisi finansial

Sumber: OECD, 2001

### Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia

Penggunaan minyak di dunia telah meningkat secara signifikan dalam dua dekade terakhir dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan adanya pengurangan dalam jumlah. Dari tahun 1990-2010, konsumsi minyak dunia meningkat sekitar 36% dari 64 milyar barel per hari hingga sekitar 87 milyar barel per hari. Peningkatan dalam permintaan akan minyak di dunia mengakibatkan naiknya harga minyak sekitar 196% dari tahun 1990 hingga 2010.<sup>32</sup> Hal tersebut menunjukkan pentingnya sumber daya alam, seperti minyak, dalam kegiatan

<sup>32</sup> Muhammad Afdi Nizar, "Dampak Fluktuasi Harga Minyak Dunia Terhadap Perekonomian Indonesia," *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* 6 No. 2 (2012): 189, <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/dampak%20fluktuasi%20harga%20minyak%20dunia.pdf>



produksi berbagai perusahaan. Sumber daya alam sering kali dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan asing yang memiliki keunggulan modal dan teknologi. Sumber daya alam merupakan salah satu faktor daya tarik di negara-negara berkembang yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan asing di negara maju. Dengan masuknya FDI dari *home country* ke *host country*, *home country* akan mendapat keuntungan berupa tersedianya sumber daya dalam jumlah yang lebih besar dan dengan harga yang lebih murah dibandingkan di negara asalnya, sementara *host country* akan mendapat berbagai keuntungan seperti adanya transfer teknologi. Namun begitu, sumber daya alam di negara-negara berkembang yang kerap menjadi negara tujuan FDI sering kali dieksploitasi oleh pihak asing yang menyebabkan kerugian secara ekonomi ataupun kerusakan lingkungan. Maka dari itu, penggunaan sumber daya alam oleh perusahaan harus dilakukan sesuai regulasi dan secara bertanggungjawab.

Daya tarik utama dari negara-negara berkembang dalam menarik FDI dari negara lain adalah adanya pasar tenaga kerja yang baik. Adanya pasar tenaga kerja yang baik dapat dilihat dari jaminan ketersediaan tenaga kerja dan upah tenaga kerja yang kompetitif. Indonesia sendiri merupakan negara dengan jumlah penduduk yang terbesar keempat di dunia, maka ketersediaan tenaga kerja selalu terjamin di Indonesia. Upah tenaga kerja yang tinggi berpengaruh terhadap kenaikan biaya produksi yang kemudian mengakibatkan penurunan produksi dan keuntungan perusahaan. Korelasi negatif antara tingkat upah tenaga kerja di suatu negara dengan arus FDI berarti peningkatan tingkat upah tenaga kerja akan menurunkan arus masuk FDI. Para investor asing cenderung lebih memilih lokasi,

investasi dimana tenaga kerja tersedia dengan upah yang relatif rendah apabila dibandingkan di *home country*. Hal tersebut juga menjadi keuntungan komparatif yang dimiliki oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia dibandingkan negara-negara maju. Kualitas tenaga kerja di suatu negara juga dapat berpengaruh terhadap keputusan investor untuk menentukan lokasi investasinya. Bagi perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar dan biaya yang murah, maka negara berkembang seperti Indonesia memiliki daya tarik, dimana di negara maju dengan tenaga kerja yang memiliki keahlian yang lebih tinggi akan membutuhkan upah tenaga kerja yang lebih besar pula. Namun, bagi perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki keahlian khusus, perusahaan tersebut akan cenderung lebih memilih negara dimana tenaganya memiliki keahlian yang lebih tinggi walaupun biayanya tentu akan lebih besar. Maka dari itu, korelasi antara tenaga kerja dengan arus masuk FDI juga bergantung pada jenis perusahaan yang akan melakukan investasi.

### **Infrastruktur**

Infrastruktur yang baik dalam suatu negara akan menunjang aktivitas ekonomi dan pertumbuhan perekonomian yang lebih baik pula. Secara umum, negara dengan infrastruktur yang baik di bidang transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, energi, dan perbankan akan menarik arus masuk FDI yang lebih besar. Investor asing akan lebih tertarik untuk menanamkan investasinya di negara yang memiliki infrastruktur yang berstandar internasional karena dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan produksi serta mengurangi biaya produksi.

Pemerintah negara-negara berkembang harus dapat memenuhi dan meningkatkan faktor-faktor determinan di atas untuk dapat menarik minat perusahaan asing dan dengan demikian meningkatkan arus masuk FDI ke negaranya. Pemerintah Indonesia, menyadari hal tersebut, kini semakin gencar dalam menajalakan berbagai strategi dan mereformasi berbagai kebijakan agar Indonesia dapat meningkatkan minat perusahaan asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Salah satu strategi yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo yaitu dengan pemberlakuan Paket Kebijakan Ekonomi. Melalui strategi tersebut, diharapkan tingkat arus masuk FDI ke Indonesia dapat meningkat dan membantu pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dalam penelitian ini kemudian akan dibahas mengenai relevansi isi dari Paket Kebijakan Ekonomi tersebut dengan faktor-faktor determinan preferensi perusahaan asing sebagaimana telah dijelaskan dalam kerangka pemikiran ini.

## **1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1.6.1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Berbeda dengan metode kuantitatif yang mengandalkan alat ukur, metode penelitian kualitatif menggunakan pengumpulan data yang berasal dari berbagai sumber seperti, buku, jurnal, hasil wawancara, atau internet. Data-data yang diperoleh kemudian akan disusun kembali oleh penulis. Setelah itu, penulis akan menganalisis data-data tersebut dengan menghubungkan data-data tersebut dengan teori dalam kerangka pemikiran sehingga dapat menghasilkan

teori, gagasan, dan pemikiran baru.<sup>33</sup> Tulisan penelitian ini bersifat deskriptif eksplanatif. Penulis akan mendeskripsikan dan mengelaborasi isi dari 16 jilid Paket Kebijakan Ekonomi. Kemudian berdasarkan penjelasan tersebut, penulis akan menganalisis relevansi dari Paket Kebijakan Ekonomi tersebut satu per satu berdasarkan teori FDI yang telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya. Sehingga dengan demikian dapat dihasilkan gambaran yang jelas mengenai relevansi jilid 1 sampai jilid 16 Paket Kebijakan Ekonomi Presiden Joko Widodo terhadap tingkat arus masuk FDI Indonesia dalam periode 2014-2017.

#### **1.6.2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yang menggunakan metode kualitatif adalah dokumentasi. Menurut Hamidi, metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan.<sup>34</sup> Sementara menurut Arikunto, metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.<sup>35</sup> Maka melihat kedua pengertian tersebut, dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data menggunakan beragam informasi yang tersedia dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain sebelumnya, laporan resmi dari pemerintah Indonesia, laporan resmi dari beragam organisasi-organisasi pemerintahan maupun non-pemerintahan, serta koran dan/atau artikel berita dari

---

<sup>33</sup> Dr. J. R. Raco, M.E., M.Sc., *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010).

<sup>34</sup> Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian* (Malang: UMM Press, 2004).

<sup>35</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)

media cetak atau elektronik. Sumber-sumber tersebut dikumpulkan, untuk kemudian diinterpretasi dan disusun menjadi sebuah karya ilmiah yang baik.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini dibagi atas 4 (empat) bab, yaitu pendahuluan yang terdiri dari 1 (satu) bab, pembahasan yang terbagi ke dalam 2 (dua bab), dan simpulan yang dijabarkan dalam 1 (satu) bab.

Bab I berisi Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan pengumpulan data, serta sistematika pembahasan yang terkandung dalam penelitian.

Bab II berisi penjelasan dan gambaran lengkap mengenai dinamika arus masuk FDI ke Indonesia terutama dalam periode 2014-2017. Dalam bagian ini akan dijelaskan pula gambaran mengenai hambatan dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam rangka meningkatkan FDI yang masuk.

Bab III berisi tentang analisis relevansi masing-masing dari 16 jilid Paket Kebijakan Ekonomi Presiden Joko Widodo terhadap tingkat FDI yang masuk ke Indonesia. Analisis tersebut akan dilakukan dengan berdasarkan pada kerangka teoritis *eclitic paradigm*, konsep FDI, dan determinan FDI Indonesia.

Bab IV berisi simpulan dari penelitian ini. Pada bagian ini akan dielaborasi simpulan dari seluruh pokok bahasan yang telah diteliti pada bab-bab sebelumnya, serta temuan-temuan yang menjawab pertanyaan penelitian terkait dengan relevansi 16 jilid Paket Kebijakan Ekonomi yang dicanangkan

Presiden Joko Widodo terhadap tingkat *Foreign Direct Investment* (FDI) yang masuk ke Indonesia.